

SKRIPSI

**PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN
DENGAN PUSAT, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2014-2018)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau
Pekanbaru



RAHMI EDA AULIA
NPM. 165310470

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2021**

ABSTRAK

PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DENGAN PUSAT, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014-2018)

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sangat dibutuhkan adanya evaluasi. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Daerah, Tingkat Ketergantungan dengan Pusat, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan survey design. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketergantungan dengan Pusat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Belanja Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ukuran Daerah, Ketergantungan dengan Pusat dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ada pengaruh sebesar 65.4% yang diberikan dari variabel Ukuran Daerah, Ketergantungan dengan Pusat dan Belanja Daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau. Jadi, ada 34.6% lainnya yang akan disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Kata Kunci: ukuran daerah, ketergantungan dengan pusat, belanja daerah, kinerja

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL SIZE, LEVEL OF DEPENDENCE WITH THE CENTER, AND REGIONAL EXPENDITURES ON THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS

(Empirical Study on Regency Governments in Riau Province for Fiscal Year 2014-2018)

In the administration of local government, evaluation is very much needed. Evaluation of local government administration to measure the performance of the local government. This study aims to determine the effect of Regional Size, Level of Dependence on the Center, and Regional Expenditures on the Performance of Regency / City Governments in Riau Province for the 2014-2018 Fiscal Year. The research method used is quantitative with a survey design. The analysis technique used is multiple linear regression. The results of this study indicate that the size of the area has a significant effect on the performance of local governments. Dependence on the Center has a significant effect on the performance of local governments. Regional Expenditures have a significant effect on the performance of local governments. Regional Size, Dependence on the Center and Regional Expenditures together have a significant effect on the performance of local governments. There is an influence of 65.4% which is given from the variables of Regional Size, Dependence on the Center and Regional Expenditures on the performance of the City/Regency Regional Governments in Riau Province. So, there is another 34.6% that will be contributed by other variables that are not included in this study.

Keywords: *regional size, dependence on the center, regional expenditure*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur selalu terucap kehadirat Allah SWT, atas berkat nikmat, anugrah dan hidayah yang selalu dilimpahkan kepada kita semua terutama kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DENGAN PUSAT, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH** (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014-2018)” dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktu yang telah ditargetkan. Shalawat beserta salam senantiasa terucap kepada sang pahlawan hak dan perubah peradaban, Rasulullah Muhammad SAW, karena perjuangan beliau lah kita dapat menikmati hidup dalam dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan pengajuan teknologi pada saat ini.

Selanjutnya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan, serta motivasi yang diberikan beberapa pihak, hingga mendorong penulis dalam mengerjakannya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Dr. Eva Sundari, S.E. MM., CRBC.
3. Ketua Program Studi Akutansi Universitas Islam Riau ibu Dr. Siska, S.E., M.Si., Ak., CA.

4. Dosen Pembimbing bapak Dr. Zulhelmy, S.E., Msi., Ak., CA., ACPA yang telah membimbing dan memberi arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyelesaian skripsi ini tepat waktu.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu kepada saya sebagai penulis.
6. Kepada Ayah, Bunda dan Cide yang telah memberi dukungan penuh kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
7. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang memerlukan.

Pekanbaru, 7 Juli 2021

Penulis

Rahmi Eda Aulia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	12
2.1.1 Teori Otonomi Daerah	12
2.1.2 Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD).....	13
2.1.3 Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	13
2.1.4 Kinerja Pemerintah Daerah	14
2.1.5 Karakteristik Pemerintah Daerah	17
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
2.3.1 Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Pemda	27
2.3.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pusat Terhadap Kinerja Pemda	28
2.3.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemda	29
2.4 Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Metode Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	32

3.3	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	33
3.3.1	Kinerja Pemerintah Daerah	33
3.3.2	Ukuran Daerah	34
3.3.3	Tingkat Ketergantungan dengan Pusat	34
3.3.4	Variabel Belanja Daerah	35
3.4	Populasi dan Sampel	37
3.5	Jenis dan Sumber Data	37
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7	Teknik Analisis Data.....	38
3.7.1	Analisis Regresi Linier Berganda	38
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.7.3	Uji Hipotesis	42
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN		45
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
5.1	Hasil Penelitian	46
5.1.1	Ukuran Daerah	46
5.1.2	Tingkat Ketergantungan dengan Pusat	52
5.1.3	Belanja Daerah	57
5.1.4	Kinerja Pemerintah Daerah.....	61
5.2	Hasil Analisis Data.....	67
5.2.1	Hasil Uji Asumsi Klasik	67
5.2.2	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	67
5.2.3	Hasil Pengujian Hipotesis	72
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN		78
6.1	Kesimpulan	78
6.2	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1	Definisi Operasional	36

Tabel 3.2	Populasi dan Sampel.....	38
Tabel 3.3	Kriteria Pengujian Autokorelasi	42
Tabel 4.1	Objek Penelitian	46
Tabel 5.1	Total Aset Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau	48
Tabel 5.2	Ukuran Daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau	50
Tabel 5.3	Dana Alokasi Umum Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau.....	53
Tabel 5.4	Tingkat Ketergantungan dengan Pusat	56
Tabel 5.5	Belanja Daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau	59
Tabel 5.6	Efisiensi Kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten di Riau	62
Tabel 5.7	Kinerja Pemerintah Daerah Se Provinsi Riau.....	65
Tabel 5.8	Hasil Uji Kolmogorov Smirnov-Z Test.....	70
Tabel 5.9	Hasil Uji Multikolinearitas	71
Tabel 5.10	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	74
Tabel 5.11	Hasil Uji t.....	76
Tabel 5.12	Hasil Uji F	77
Tabel 5.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran	32
Gambar 5.1	Ukuran Daerah.....	52

Gambar 5.2	Tingkat Ketergantungan dengan Pusat	58
Gambar 5.3	Belanja Daerah	61
Gambar 5.4	Kinerja Pemerintah Daerah	68
Gambar 5.5	Hasil Uji Normalitas Data	69
Gambar 5.6	Hasil Uji Multikolinearitas Grafik Scatterplot	72

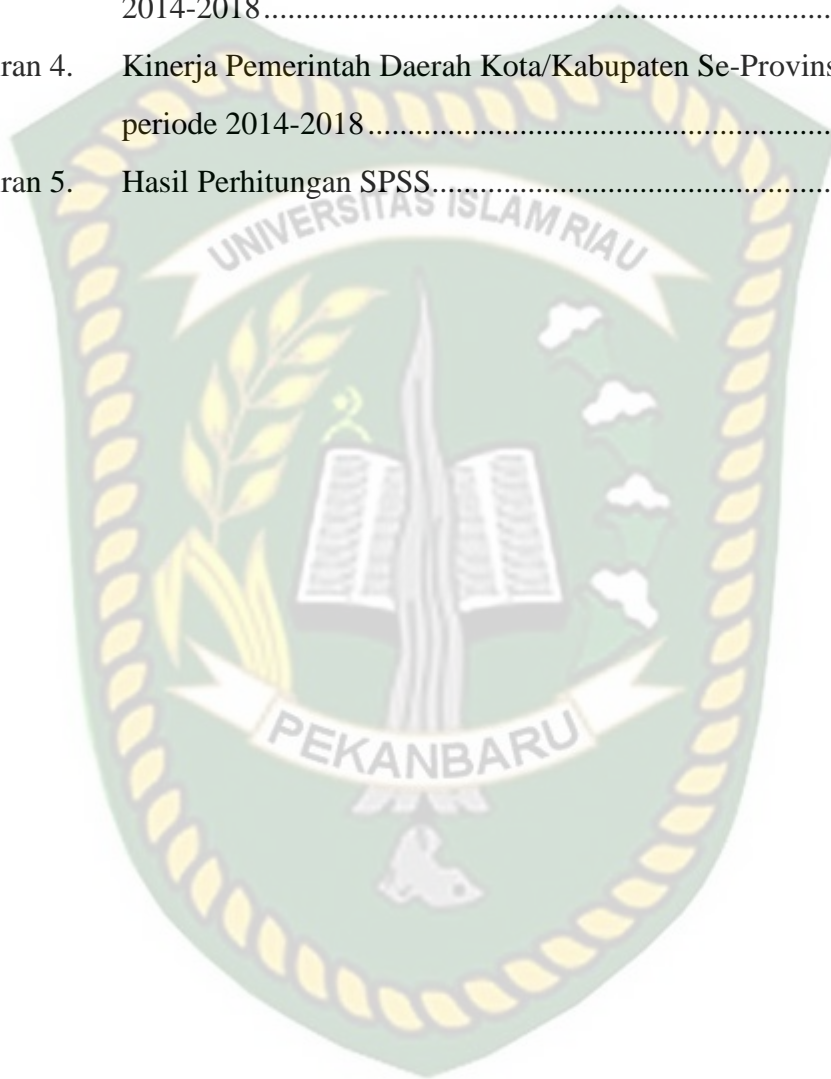


Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Ukuran Daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau	85
-------------	---	----

Lampiran 2.	Ketergantungan dengan Pusat oleh Kota/Kabupaten Se- Provinsi Riau periode 2014-2018	88
Lampiran 3.	Belanja Daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau periode 2014-2018	91
Lampiran 4.	Kinerja Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau periode 2014-2018	93
Lampiran 5.	Hasil Perhitungan SPSS.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemerintahan yang berdasarkan asas otonomi daerah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah). Beberapa misi yang terkandung dalam otonomi daerah yaitu, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kesejahteraan umum dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Mengenai adanya otonomi daerah diharapkan akan memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Pemerintah daerah juga harus mampu membuat laporan keuangan dan transformasi informasi anggaran kepada publik sehingga dapat tercapainya penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara baik, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) suatu pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak terjadi kecurangan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 (UU No.9/2015) tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan Pemda untuk mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi juga mewajibkan kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan informasi laporan penyelenggaraan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat, pelaporan ini perlu dilakukan sebagai evaluasi terhadap kinerja pemda, hal ini bertujuan agar pelaksanaan kinerja dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan masing-masing pemerintah daerah. Pasal 5 Permendagri No.73 Tahun 2009 memberikan aturan dan arahan tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKKPD) yang menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama pada informasi tercapainya kinerja pada pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Isi LPPD Pemda kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggungjawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut.

Apabila kita ingin mengetahui penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya kita harus melihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut, seperti yang di tetapkan dalam PP No.6 Tahun 2008 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sangat dibutuhkan adanya evaluasi. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah tersebut. Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut.

Pengukuran kinerja sektor publik untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja yang mengandalkan pada aspek finansial mulai jarang digunakan, hal ini dikarenakan dianggap hanya mengejar tujuan profitabilitas jangka pendek semata. Jika pengukuran kinerja dilakukan bagi pemerintah yang tidak berorientasi profit, maka sangat diperlukan ukuran-ukuran yang lebih komprehensif.

Kinerja pemerintah daerah juga bisa dilihat dari aspek non finansial seperti masalah pegawai yang dikaitkan dengan prestasi kinerja dan kualitas pelayanan

publik. Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan daerah yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat menjadi sebagai dasar pertanggungjawaban terhadap publik, dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut juga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan.

Untuk menciptakan pemerintahan yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu terlaksana sistem akuntabilitas di pemerintahan, sehingga dapat dilihat hasil dari pelaksanaan program kinerja pemerintah dapat di evaluasi apakah telah efektif, ekonomi, dan efisien. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan pemerintah daerah, yang merupakan laporan eksternal dari pemerintah yang tidak akan terlepas dari pengawasan para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri terhadap skor pemeringkatan dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2016 terhadap peringkat dan skor kinerja pada tahun 2015 menunjukkan bahwa peringkat dan status kinerja provinsi Riau tidak ditampilkan (N/A) atau *Not Available* dikarenakan Kepala daerahnya diberhentikan sementara per Tanggal 1 April 2015 dikarenakan menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Hal ini memang terbukti dikarenakan ditahun tersebut mantan Gubernur Riau pada saat itu diperiksa oleh KPK karena diduga terlibat kasus suap. Mantan Gubernur Riau ditangkap karena menerima suap senilai 2 milyar dari pengusaha gulat maurung terkait dengan proses alih fungsi lahan seluas 140 hektare lahan kebun sawit di

Kabupaten Kuantan Singingi. Jabatannya di ganti oleh Plt atau wakilnya. Sementara skor kinerja pemeringkatan Kota Pekanbaru terceder pada posisi 58 dari 91 kota di Indonesia adapun skor nya hanya 2,8970 dan status T (tinggi).

Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa *size* (ukuran) yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudahan dalam kegiatan operasional juga meberikan kelancaran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja, akan tetapi dengan adanya *size* yang besar, hal ini juga membuat pemerintah memiliki kewajiban agar meningkatkan akuntabilitasnya karena *size* yang besar bisa saja menimbulkan penyalahgunaan yang besar. Sedangkan akuntabilitas dapat ditunjukan secara tidak langsung dengan perubahan kinerja keuangan pemerintah yang lebih baik.

Tingkat ketergantungan pada pusat dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemda akan menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sesuai dengan keadaan masing-masing pemda, semakin besar DAU maka pengawasan dari pemerintah pusat akan semakin ketat dengan hal ini diharapkan dapat membuat pemda semakin hati-hati dalam melakukan program yang dijalankannya. Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari alokasi DAU sehingga hal ini memotivasi pemerintah daerah agar bekerja lebih baik.

Belanja daerah dalam pemerintah daerah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menunjang adanya fasilitas yang baik untuk masyarakat. Pemerintah membuat pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara yang tercermin didalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah, jadi jika belanja modal sebuah pemerintah daerah besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian tentang pengaruh karakteristik pemda yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) dijelaskan bahwa karakteristik pemda menggunakan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal dan temuan audit BPK. Nugroho (2014) tentang pengaruh karakteristik pemda dan temuan audit BPK. Variabel ukuran pemerintah daerah pada penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) menunjukkan tidak adanya pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitrisari (2012) dimana variabel ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Lebih lanjut, penelitian oleh Sudarsana (2013) menunjukkan tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ara (2016) yang menunjukkan adanya pengaruh ketergantungan pusat terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitrisari (2012) juga menunjukkan tidak

adanya pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian-penelitian yang dianggap relevan diatas dijadikan oleh peneliti sebagai alasan peneliti dalam mengangkat judul ini karena perlu dan layak untuk diteliti lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian, alasan lainnya yaitu berdasarkan fenomena yang telah diobservasi oleh peneliti pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengemukakan beberapa hal seperti yang dilansir dari haloriau.com pada tanggal 11 Juni 2019 menyatakan bahwa kinerja organisasi perangkat daerah menurun dan dari sekian banyak OPD hanya 2 yang mendapatkan prediket BB hal tersebut diketahui bahwa masih kurangnya SDM yang bermutu dari tenaga IT sehingga hasil tersebut tidak maksimal.

Selanjutnya, fenomena lainnya diketahui pada dalam masalah keuangan daerah, perimbangan pembiayaan pemerintah pusat dan daerah dengan pendapatan yang secara leluasa digali sendiri untuk mencukupi kebutuhan sendiri masih mempunyai kelemahan sehingga keterbatasan dalam potensi penerimaan daerah tersebut bisa menjadikan ketergantungan terhadap transfer pusat. Pemerintah Daerah selama ini memiliki keterbatasan pembiayaan dari potensi sendiri (PAD). Selama ini komponen pembiayaan terbesar berasal dari dana transfer dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan hanya sebagian kecil dari PAD, potensi pembiayaan lain yang belum dikelola yaitu dari pinjaman daerah.

Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan memiliki keuntungan, antara lain dapat mengatasi keterbatasan kemampuan riil atau nyata pada saat ini dari suatu daerah yang sebenarnya potensial dan memiliki kapasitas

fiskal yang memadai. Dengan pinjaman dapat mendorong percepatan proses pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah-daerah yang dimaksud. Jenis pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai layanan masyarakat yang tidak menghasilkan penerimaan. Sedang pinjaman jangka pendek dipergunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan. Untuk mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat pinjaman jangka panjang dianggap lebih efektif daripada jangka pendek

Karena tidak konsistennya terhadap hasil penelitian tersebut dan berdasarkan fenomena diatas, hal ini menjadi motivasi yang mendorong penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian dari Sudarsana (2013). Oleh karena itu penulis menentukan penelitian ini yang berjudul **PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DENGAN PUSAT, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014-2018)**.

1.2 Rumusan Masalah

Perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau . Dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota?

2. Apakah tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti sehubungan dengan permasalahan adalah:

1. Menganalisis pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan dengan pusat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Secara teoritis untuk menjelaskan sebuah fenomena yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah serta menganalisis pengaruh ukuran daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja daerah, temuan audit, dan opini audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Manfaat praktis untuk memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah dalam bentuk pendapat tentang

pentingnya kesadaran dalam pencapaian suatu kinerja baik dalam finansial maupun non finansial.

2. Manfaat bagi Penulis sebagai bahan pembelajaran untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau.
3. Manfaat bagi Akademisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai penetapan peringkat dan status kinerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi dalam enam bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan secara singkat gambaran umum perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari pengolahan data yang telah didapatkan kemudian untuk dibahas dan ditarik kesimpulan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang telah didapatkan dari pembahasan penelitian dan saran untuk perusahaan maupun untuk penelitian yang akan datang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

LPPD memiliki ruang lingkup yang mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah. Urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar berkaitan dengan hak dan pelayanan dengan masyarakat. Urusan pilihan adalah urusan yang ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LPPD ialah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah. (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. LPPD berguna bagi pemerintahan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. LPPD kota disampaikan walikota kepada menteri melalui gubernur.

2.1.3 Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah pelaksanaannya disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup:

1. APBD dan realisasi APBD provinsi, kota dan kabupaten
2. Neraca Daerah
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas laporan keuangan daerah
5. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
6. Laporan keuangan perubahan daerah dan
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

2.1.4 Kinerja Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan capaian atas penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008.

Permendagri No.73 Tahun 2009 menyebutkan bahwa salah satu evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah terhadap Pemda menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama. EKPPD ialah sebuah proses pengumpulan dan analisis

data dengan sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkelanjutan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. LPPD ini difokuskan pada informasi mengenai capaian kinerja pada tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Menurut Mardiasmo(2009) IKK adalah sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik bersifat finansial ataupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis.

Aspek tataran pengambilan kebijakan pada pengukuran indeks capaian kinerja dengan menilai IKK:

1. Ketentraman dan ketertiban umum daerah,
2. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta antar pemerintah daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah,
3. Keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah,
4. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD,
5. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan,
6. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan,

7. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada peraturan perundang-undangan,
8. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat,
9. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan, penyerapan DAU, DAK, dan bagi hasil,
10. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah,
11. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD,
12. Pengelolaan potensi daerah dan
13. Terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Aspek tataran pelaksanaan kebijakan daerah pada pengukuran dengan menilai IKK:

1. Kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan,
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
3. Tingkat capaian standar pelayanan publik,
4. Penataan kelembagaan daerah,
5. Pengelolaan kepegawaian daerah,
6. Perencanaan pembangunan daerah,
7. Pengelolaan keuangan daerah,
8. Pengelolaan barang milik daerah dan
9. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat.

Pada pasal 32 Permendagri No 73 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota secara nasional, disusun berdasarkan peringkat, skor, dan status. Dari hasil ini dapat diketahui Skor Kinerja untuk masing-masing Pemda provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.1.5 Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakteristik adalah mempunyai sifat khas(kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali didaerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Juliawati, (2012) dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Sudarsana (2013:9) menyatakan bahwa “karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.” “Karakteristik pemerintah daerah dapat berupa ukuran daerah, kesejahteraan, *functional differentiation*, umur daerah, latar belakang pendidikan

kepala daerah, leverage daerah dan intergovernmental revenue.” Sudarsana (2013:14).

2.1.5.1 Ukuran Daerah

Size (ukuran) adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Penelitian Sudarmadji dan sularto (2007) menyatakan, ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa perusahaan tersebut.

Variabel ukuran daerah pada penelitian ini diproyeksikan dengan nilai total asset yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus didukung oleh asset yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sumberdaya dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan besarnya nilai asset suatu pemda maka diharapkan juga kinerja penyelenggaraan pemerintah akan semakin baik pula tentunya.

“Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja.” (Kusumawardani, 2012:30)

Pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki ukuran besar maka memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Pengungkapan ini atas laporan kinerja akan lebih tertarik untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good News* dapat berupa laporan tentang baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kinerjanya.

2.1.5.2 Tingkat Ketergantungan pada Pusat

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka penacapaian tujuan pemberian otonomi kepala daerah. Sudarsana (2013) menyatakan: DAU bersiat “block grante” yang berarti penggunaannya diserahkan pada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN
- b. DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan sebagai diatas.

- c. DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota.

Pemberian DAU akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Jika DAU sebuah pemerintah daerah besar maka tentunya pengawasan dari pemerintah pusat tentu akan semakin ketat sehingga dengan adanya hal ini diharapkan akan membuat pemda lebih berhati-hati dalam melaksanakan program kinerjanya.

2.1.5.3 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah bias digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Manajemen belanja daerah mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efektifitas dan efisien anggaran. Penganggaran belanja daerah juga harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan. Hal ini diharapkan untuk menghindari anggaran defisit yang melebihi cadangan yang tersedia sehingga terhindar dari adanya utang daerah.

Dalam menganggarkan belanja daerah, khususnya dalam pemberian pelayanan umum harus dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Dengan adanya efisiensi dan efektifitas anggaran belanja, harus menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat.

Sudarsana (2013) menyatakan bahwa: Beban dilingkungan akuntansi komersial dapat didefinisikan sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset yang terjadi selama periode tertentu yang, atau berasal dari produksi barang, penyerahan jasa atau aktifitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas.

Belanja daerah yang besar mencerminkan mencerminkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah itu banyak maka akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Belanja daerah digunakan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja daerah merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Abdullah, 2006).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian berkaitan dengan ukuran daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja daerah dan pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian berkaitan dengan pengaruh karakteristik pemda dilakukan oleh Sudarsana (2013) dan Meilina (2016) yang mengaitkannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Beberapa penelitian telah dilakukan, tetapi masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh ukuran daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, dan belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitrisari (2012) yang menguji bahwa karakteristik suatu pemerintah daerah (ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan pada pusat dan belanja daerah) memiliki pengaruh terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/kota dengan menggunakan beberapa metode regresi untuk 275 PEMDA untuk tahun 2007. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel ukuran, tingkat kekayaan, tingkat

ketergantungan pada pusat, belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemda yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah yang berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda.

Sudarsana (2013) Penelitian ini bertujuan untuk menguji bahwa karakteristik pemda (ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dengan pusat dan belanja daerah) terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja daerah yang diukur dengan skor hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang berasal dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2010. Jumlah total sampel pada penelitian ini adalah 367 Pemda dengan menggunakan analisis regresi ordinal (PLUM) menggunakan aplikasi SPSS 19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan ukuran daerah, belanja daerah, dan tingkat ketergantungan dengan pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Nugroho (2014) pada penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011. Total sampelnya ialah 105 dari 3 Tahun pengamatan (2009, 2010, 2011). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah

daerah, sedangkan variabel ukuran daerah, kemakmuran daerah, dana perimbangan dan belanja daerah tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari ketiga hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidak konsistenan mengenai pengaruh variabel yang akan diuji pada penelitian ini terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menilai kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari variabel ukuran daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, dan belanja daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013).

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Mustikarini dan Fitrisari (2012)	Ukuran daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah terhadap kinerja pemda.	Semua Variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda
2.	Nanda F Veriza (2017)	Ukuran daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja daerah, ukuran	Tingkat kekayaan daerah, dan belanja daerah memiliki pengaruh terhadap

		legislative terhadap kinerja Pemda	kinerja pemda. Ukuran daerah, tingkat ketergantungan, ukuran legislative
3.	Sudarsana (2013)	Ukuran daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah terhadap kinerja pemda.	Variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Sedangkan ukuran daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.
4.	Nugroho (2014)	Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, status daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja pemda.	Variabel tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, status daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Sedangkan variabel ukuran daerah, dan belanja daerah.

5.	Arfian (2016)	Variabel tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, leverage terhadap kinerja pemerintah daerah	Semua Variabel Berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
6.	Ara (2016)	Variabel tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja modal terhadap kinerja pemda.	Semua variabel berpengaruh terhadap kinerja pemda.
7.	Budianto (2012)	Variabel Opini audit, temuan audit dan <i>gender</i> terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini audit dan <i>gender</i> berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
8.	Meilina (2016)	Variabel PAD, Belanja Daerah, dan DAU.	Semua Variabel berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
10.	Kusumawardani (2012)	Variabel ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Variabel ukuran pemerintah daerah dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

			daerah.Sedangkan variabel kemakmuran dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
11.	Muflihatin (2016)	Variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, opini audit, fungsi pengawasan DPRD, tingkat ketergantungan pada pusat.	Ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda, sedangkan opini audit, fungsi pengawasan DPRD dan tingkat ketergantungan dengan pusat tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemda.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran daerah ,tingkat ketergantungan dengan pusat, dan belanja daerah terhadap kinerja pemerintah

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Berikut adalah kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian ini:

2.3.1 Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Pemda

Tujuan utama dari program kerja pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan terbaik, perlu didukung oleh aset yang baik. Untuk itu, perlu sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemda tersebut. Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa *size* (ukuran) yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pelayanan yang baik dapat diberikan oleh pemerintah daerah jika didukung dengan aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang kecil ukurannya. Hal ini dipertegas oleh penelitian Fitrisari (2012) dan Kusumawardani (2012) serta Sudarsana (2013) bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Dari uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemda kabupaten/kota.

2.3.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pusat Terhadap Kinerja Pemda

Selain ukuran pemda, tingkat ketergantungan pemda, kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat juga berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan public dan memajukan perekonomian daerah.

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Walaupun penggunaan ditetapkan oleh daerah namun penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. DAU digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari alokasi DAU sehingga hal ini memotivasi pemda untuk berkinerja lebih baik. Hal ini membuat semakin tinggi ketergantungan pemda pada pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan pemda kepada masyarakat, sehingga kinerja pemda juga semakin meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H2 : Tingkat Ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemda.

2.3.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemda

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran selain itu juga dapat menambah aset atau kekayaan daerah dan tentunya hal ini memerlukan belanja yang rutin. Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara yang tercermin di dalam Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan besarnya belanja daerah menunjukkan banyaknya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang dibangun. Banyak pembangunan yang dilakukan tentunya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja pemerintah daerah juga menjadi semakin lebih baik. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H3 : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.2.4 Pengaruh Ukuran Daerah, Tingkat Ketergantungan dengan Pusat dan Belanja Daerah dengan Kinerja Pemda

Melalui serangkaian pengujian hipotesis di atas, melalui penelitian ini peneliti berasumsi bahwa terdapat pengaruh simultan antara ukuran daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat dan belanja daerah dengan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

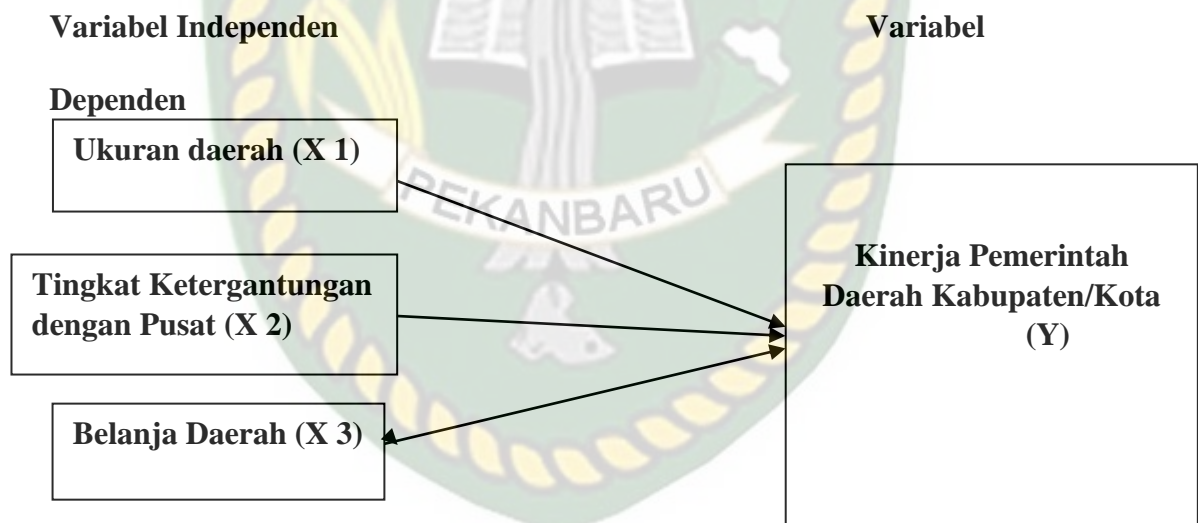
H4 : Ukuran Daerah, Tingkat Ketergantungan dengan Pusat, dan Belanja Daerah berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, penelitian ini akan menguji pengaruh ukuran daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja daerah, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, maka disusunlah model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Azwar (2011:5) metode kuantitatif adalah metode yang menekankan analisisnya pada data-data angka dan diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti.

Sedangkan desain penelitian ini menggunakan pendekatan *survey*. Menurut Sugiyono (2017:81) metode penelitian *survey* adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu BPK Perwakilan Provinsi Riau yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 721 yang mana terfokuskan kepada daftar laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LHP LKPD) yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Riau.

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.3.1 Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah skor kinerja pemerintah daerah kota pekanbaru. Skor kinerja pemerintah daerah kota yang berasal dari Laporan Hasil Evaluasi Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan LPPD tahun 2014-2018 tingkat nasional dengan *range* nilai 0-4, dan kualifikasi penilaian tersebut terbagi dalam empat penilaian, yaitu:

- 1) 3,01-4,00 = Sangat Tinggi
- 2) 2,01-3,00 = Tinggi
- 3) 1,01-2,00 = Sedang
- 4) 0,00-1,00 = Rendah

Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian *portofolio* secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD tahun 2014-2018 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi pemingkatan kinerja Pemda ini baru pertama kali dilakukan untuk LPPD tahun anggaran 2007 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 2009 oleh Kementerian Dalam Negeri. Kinerja Pemerintah Daerah juga dapat dikatakan bagaimana pencapaian pemerintah daerah terhadap target-target dan SOP yang sudah ditetapkan ataupun direncanakan.

3.3.2 Ukuran Daerah

Ukuran dapat diukur dengan banyak cara, antara lain jumlah karyawan, aktiva, total pendapatan dan tingkat produksi. Ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitrisari (2012), “ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan logaritma natural (\ln) dari total aset. Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing Pemda dari tahun ke tahun mempunyai selisih yang memungkinkan besar, sehingga menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total pendapatan perlu di \ln kan. Pertimbangan penggunaan nilai aktiva pengukuran ini karena nilai aktiva lebih stabil dari nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar.

3.3.3 Tingkat Ketergantungan dengan Pusat

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitrisari (2012), “tingkat ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah “. Dana Alokasi Umum untuk setiap kabupaten/kota dapat dilihat melalui pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Variabel tingkat ketergantungan diukur dengan rumus:

$$\text{Tingkat Ketergantungan dengan Pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3.3.4 Variabel Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No 23 Tahun 2014 Belanja Daerah merupakan: Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahun yang bersangkutan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan menyatakan rasio Belanja Daerah terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Daerah. Realisasi Belanja Daerah akan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Maka variabel Belanja Daerah dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Belanja}}$$

Tabel 3.1

Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kinerja Pemerintah daerah (Y)	Capaian atas urusan penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau	Skor 0-4 sesuai dengan skor pemeringkatan kinerja pemda	Dummy

	dampak lain. (UU No.73 Tahun 2009)	(Nanda F Veriza, 2017)	
Ukuran daerah (X1)	Ukuran daerah diproksikan dalam bentuk total asset pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitrisari, 2012)	Total asset ditunjukkan dengan rumus Total Aset = Natural log (Mustikarini dan Fitrisari, 2012)	Rasio
Tingkat ketergantungan dengan pusat (X2)	Dana Alokasi Umum ialah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (UU No.23 Tahun 2014)	Dana Alokasi Umum dibandingkan dengan total pendapatan (Sudarsana, 2013).	Rasio
Belanja daerah (X3)	Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahun yang bersangkutan (UU No. 23 Tahun 2014)	Rasio belanja daerah terhadap realisasi belanja daerah mencerminkan	Rasio

		belanja daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).	
--	--	--	--

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kantor pemerintah daerah Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kota/Kabupaten. Maka dari itu, teknik penarikan sampelnya menggunakan sensus sampling atau sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2010:61-63) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi peneliti menggunakan seluruh sampel yang diambil dari populasi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Populasi dan Sampel

No	Daftar Kota/Kabupaten di Provinsi Riau
1	Kota Pekanbaru
2.	Kota Dumai
3.	Kabupaten Kuantan Singingi
4.	Kabupaten Indragiri Hulu
5.	Kabupaten Indragiri Hilir
6.	Kabupaten Pelalawan

7.	Kabupaten Siak
8.	Kabupaten Kampar
9.	Kabupaten Rokan Hulu
10.	Kabupaten Rokan Hilir
11.	Kabupaten Bengkalis
12.	Kabupaten Kepulauan Meranti

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk penelitian terhadap variabel ukuran daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, dan belanja daerah. Data neraca Pemda untuk mendapatkan total aset, anggaran belanja pemda untuk mendapatkan total anggaran belanja, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan DAU, didapatkan melalui LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang juga dimuat dalam LHP LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Riau, dan data LHP atas LKPD yang di dapat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Data temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini ialah temuan dan opini atas ketidakpatuhan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru terhadap peraturan perundang-undangan tahun anggaran 2014-2018. Sedangkan skor pemeringkatan kinerja pemda diperoleh melalui www.otda.kemendagri.com

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.
2. Metode pustaka, yaitu pengambilan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu yang diperoleh dari dokumen, bukti, artikel, serta sumber tertulis lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2016:95) analisis regresi linier berganda ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan dan penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan estimasi regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\hat{Y} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

\hat{Y} = Loyalitas Karyawan

b_0 = Nilai Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X_1 = *Work Life Balance*

X_2 = Kepuasan Kerja

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Mengingat metode analisis yang akan digunakan adalah analisis regresi linear berganda, maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan sehingga penggunaan regresi linear berganda perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan untuk penelitian ini yang diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan dengan melalui cara yaitu menggunakan grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot, yakni jika pola penyebaran memiliki normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji korelasi antara variabel independen. Jika terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen tersebut, maka hubungan antara variabel dependen dan independen menjadi terganggu. Menurut Ghozali (2016:105), Ada dua ukuran dalam memprediksi ada tidaknya gejala multikolinieritas dalam model regresi, yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

- 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam suatu model regresi terjadi atau tidak ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Adapun dasar analisis dengan melihat grafik plot adalah sebagai berikut:

- 1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:108) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi atau tidak antara kesalahan penggunaan pada periode (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1).

Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*) dengan melihat kriteria pengujianya sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Pengujian Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_1$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_1 \leq d \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif	Terima	$d_U < d < 4 - d_U$

Sumber : Ghozali (2016:108)

3.7.3 Uji Hipotesis

3.7.3.1 Uji F

Menurut Ghozali (2016:96) uji F digunakan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel bebas (*work life balance* dan kepuasan kerja) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (loyalitas karyawan). Langkah-langkah pengujian diawali dengan membuat formulasi hipotesis sebagai berikut:

- 1) Menentukan hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

H_0 : $\beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap dependen.

$H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

- 2) Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$)
- 3) Membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} yang tersedia pada α tertentu dan mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut:

Mencari F – hitung dengan rumus:

$$F_{hitung} = R^2 / (k - 1) : (1 - R^2) / (n - k)$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

n = Jumlah Sampel

k = Jumlah Variabel Bebas

4) Kesimpulan

H_0 = Diterima bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, H_1 ditolak

H_1 = Diterima bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_0 ditolak

3.7.3.2 Uji t

Menurut Ghozali (2016:154) uji t ini dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independen (*work life balance* dan kepuasan kerja) terhadap variabel terikat (loyalitas karyawan).. Pengujian ini menggunakan kriteria dengan tingkat keyakinan 95% dengan pengujian dan tingkat signifikan 5%. Jika P value dari t masing-masing variabel independen $< \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima atau variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai P value dari t masing-masing variabel independen $> \alpha = 5\%$, artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.7.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016:98) koefisien Determinasi (R^2) biasanya mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel dependen serta digunakan untuk mengetahui persentase variabel independen secara bersama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (R^2) = 1, artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R^2) = 0, artinya variabel dependen tidak mampu menjelaskan variabel-variabel independen.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berikut ini akan dijabarkan mengenai masing-masing objek penelitian yaitu Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau dengan total 12 sampel objek penelitian, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Objek Penelitian

No	Kota/Kabupaten di Provinsi Riau
1.	Kota Pekanbaru
2.	Kota Dumai
3.	Kabupaten Kuantan Singingi
4.	Kabupaten Indragiri Hulu
5.	Kabupaten Indragiri Hilir
6.	Kabupaten Pelalawan
7.	Kabupaten Siak
8.	Kabupaten Kampar
9.	Kabupaten Rokan Hulu
10.	Kabupaten Rokan Hilir
11.	Kabupaten Bengkalis
12.	Kabupaten Kepulauan Meranti

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, dan belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini terdapat 12 Kota/Kabupaten yang menjadi sampel pada penelitian ini dimana masing-masing periode tahun yang akan diteliti yaitu tahun anggaran 2014-2018. Adapun perhitungan data menggunakan masing-masing rumus yang telah ditentukan untuk kemudian dilakukan analisa secara statistik dengan bantuan program SPSS, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

5.1.1 Ukuran Daerah

Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan dibidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Hatimah, 2018). Ukuran daerah dalam penelitian ini dapat diukur dengan melihat total aset pemerintah daerah. Hasil analisis total aset pada penelitian ini di *natural log*-kan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Total Aset Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau periode 2014-2018

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Total Aset (Rp)	Perkembangan	
				Nominal (Rp)	%
1	Pekanbaru	2014	6.170.435.232.098		
		2015	4.558.508.066.309	-1.611.927.165.789	7,38
		2016	4.647.362.955.815	88.854.889.506	10,19
		2017	4.402.824.795.007	-244.538.160.808	9,47
		2018	6.571.047.089.436	2.168.222.294.429	14,92
2	Dumai	2014	3.359.170.381.605		
		2015	2.849.552.867.044	-509.617.514.561	8,48
		2016	2.997.828.287.598	148.275.420.554	10,52
		2017	2.276.695.864.562	-721.132.423.036	7,59
		2018	2.411.262.507.844	134.566.643.282	10,59
3	Kuantan Singingi	2014	3.422.383.676.048		
		2015	2.370.734.707.782	-1.051.648.968.266	6,92
		2016	2.470.108.971.356	99.374.263.574	10,41
		2017	2.017.843.048.842	-452.265.922.514	8,16
		2018	2.218.889.851.061	201.046.802.219	10,99
4	Indragiri Hilir	2014	4.035.725.747.035		
		2015	3.069.953.231.778	-965.772.515.257	7,6
		2016	3.325.423.525.393	255.470.293.615	10,83
		2017	3.384.419.924.466	58.996.399.073	10,17
		2018	3.497.066.644.670	112.646.720.204	10,33
5	Indragiri Hulu	2014	3.459.740.586.977		
		2015	3.512.225.068.484	52.484.481.507	10,15
		2016	2.829.877.361.805	-682.347.706.679	8,05
		2017	2.720.433.662.506	-109.443.699.299	9,61
		2018	2.671.308.189.371	-49.125.473.135	9,81
6	Pelalawan	2014	3.793.727.418.958		
		2015	3.720.673.131.075	-73.054.287.883	9,8
		2016	3.678.294.499.782	-42.378.631.293	9,88
		2017	3.358.584.513.009	-319.709.986.773	9,13
		2018	4.279.494.601.857	920.910.088.848	12,74
7	Siak	2014	9.350.563.403.808		
		2015	5.543.592.850.206	-3.806.970.553.602	5,92
		2016	5.137.753.693.961	-405.839.156.245	9,26
		2017	4.675.721.455.469	-462.032.238.492	9,10
		2018	4.394.933.079.290	-280.788.376.179	9,39

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Total Aset (Rp)	Perkembangan	
				Nominal (Rp)	%
8	Kampar	2014	6.357.203.922.303		
		2015	3.208.826.760.443	-3.148.377.161.860	5,04
		2016	4.202.016.942.973	993.190.182.530	13,09
		2017	3.740.179.404.588	-461.837.538.385	8,9
		2018	3.583.591.552.527	-156.587.852.061	9,58
9	Rokan Hulu	2014	3.359.139.100.835		
		2015	2.580.853.738.702	-778.285.362.133	7,68
		2016	2.508.538.148.761	-72.315.589.941	9,71
		2017	2.587.154.499.942	78.616.351.181	10,31
		2018	2.867.966.900.185	280.812.400.243	11,08
10	Rokan Hilir	2014	8.987.693.057.811		
		2015	6.179.484.001.320	-2.808.209.056.491	6,87
		2016	5.789.825.453.887	-389.658.547.433	9,36
		2017	5.550.407.952.076	-239.417.501.811	9,58
		2018	5.303.932.973.378	-246.474.978.698	9,55
11	Bengkalis	2014	10.232.479.710.964		
		2015	8.134.779.712.877	-2.097.699.998.087	7,94
		2016	8.588.657.399.844	453.877.686.967	10,55
		2017	9.090.114.779.884	501.457.380.040	10,58
		2018	9.037.791.429.166	-52.323.350.718	9,94
12	Kepulauan Meranti	2014	3.345.675.887.451		
		2015	2.628.361.952.797	-717.313.934.654	7,85
		2016	2.780.338.676.667	151.976.723.870	10,57
		2017	2.686.578.777.193	-93.759.899.474	9,66
		2018	2.557.715.355.674	-128.863.421.519	9,52

Berdasarkan tabel 5.1, dapat diketahui dari 12 Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau mengenai masing-masing total aset yang dimiliki selama periode 2014-2018 dengan perkembangannya dimana total aset Kabupaten Kampar tahun 2016 mengalami perkembangan tertinggi diantara Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Riau yaitu peningkatan sebesar Rp 993.190.182.530,00 atau sebesar 13,09% namun di tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak Rp -461.837.538.385,00 atau 8,9%. Selanjutnya, Kabupaten

Pelalawan tahun 2018 mengalami perkembangan tertinggi kedua dari Kota/Kabupaten lainnya, yaitu sebesar Rp 920.910.088.848,00 atau 12,74% dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitrisari (2012) mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset. Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing Pemda dari tahun ke tahun mempunyai selisih yang memungkinkan besar, sehingga menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total pendapatan perlu di Ln kan. Pertimbangan penggunaan nilai aktiva pengukuran ini karena nilai aktiva lebih stabil dari nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil perhitungan ukuran daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau periode tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Ukuran Daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau periode 2014-2018

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Total Aset (Rp)	Log n Total Aset
1	Pekanbaru	2014	6.170.435.232.098	12,7903158
		2015	4.558.508.066.309	12,65882273
		2016	4.647.362.955.815	12,66720659
		2017	4.402.824.795.007	12,6437314
		2018	6.571.047.089.436	12,81763458
2	Dumai	2014	3.359.170.381.605	12,52623203
		2015	2.849.552.867.044	12,45477672
		2016	2.997.828.287.598	12,47680675

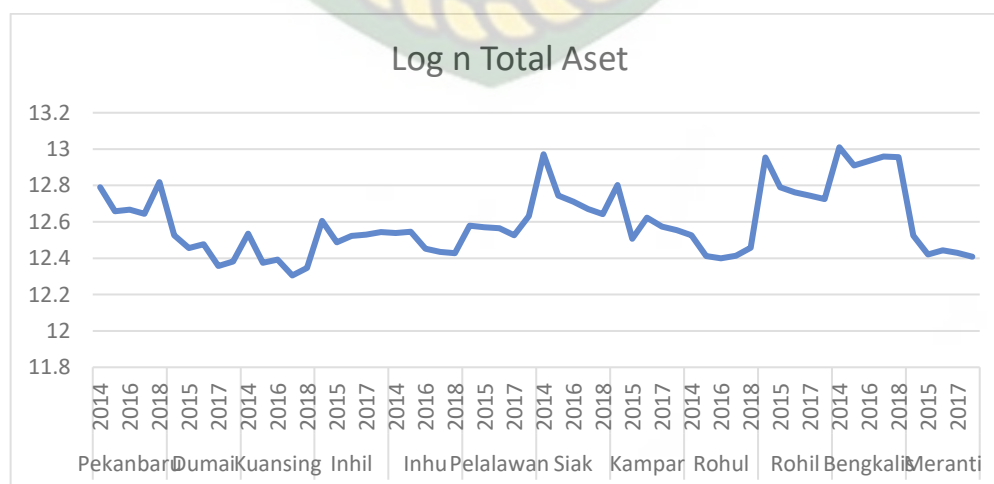
No	Kota/Kabupaten	Tahun	Total Aset (Rp)	Log n Total Aset
		2017	2.276.695.864.562	12,35730502
		2018	2.411.262.507.844	12,38224449
3	Kuantan Singingi	2014	3.422.383.676.048	12,5343287
		2015	2.370.734.707.782	12,37488296
		2016	2.470.108.971.356	12,39271611
		2017	2.017.843.048.842	12,30488738
		2018	2.218.889.851.061	12,34613574
4	Indragiri Hilir	2014	4.035.725.747.035	12,60592165
		2015	3.069.953.231.778	12,48713176
		2016	3.325.423.525.393	12,52184696
		2017	3.384.419.924.466	12,52948424
		2018	3.497.066.644.670	12,54370391
5	Indragiri Hulu	2014	3.459.740.586.977	12,53904354
		2015	3.512.225.068.484	12,54558234
		2016	2.829.877.361.805	12,45176761
		2017	2.720.433.662.506	12,43463814
		2018	2.671.308.189.371	12,426724
6	Pelalawan	2014	3.793.727.418.958	12,57906612
		2015	3.720.673.131.075	12,57062152
		2016	3.678.294.499.782	12,5656465
		2017	3.358.584.513.009	12,52615628
		2018	4.279.494.601.857	12,63139248
7	Siak	2014	9.350.563.403.808	12,97083778
		2015	5.543.592.850.206	12,74379133
		2016	5.137.753.693.961	12,71077328
		2017	4.675.721.455.469	12,66984863
		2018	4.394.933.079.290	12,64295227
8	Kampar	2014	6.357.203.922.303	12,80326614
		2015	3.208.826.760.443	12,50634627
		2016	4.202.016.942.973	12,6234578
		2017	3.740.179.404.588	12,57289243
		2018	3.583.591.552.527	12,5543185
9	Rokan Hulu	2014	3.359.139.100.835	12,52622799
		2015	2.580.853.738.702	12,41176339
		2016	2.508.538.148.761	12,39942071
		2017	2.587.154.499.942	12,41282236
		2018	2.867.966.900.185	12,45757413
10	Rokan Hilir	2014	8.987.693.057.811	12,95364823
		2015	6.179.484.001.320	12,79095221

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Total Aset (Rp)	Log n Total Aset
		2016	5.789.825.453.887	12,76266547
		2017	5.550.407.952.076	12,7443249
		2018	5.303.932.973.378	12,72459803
11	Bengkalis	2014	10.232.479.710.964	13,00998089
		2015	8.134.779.712.877	12,9103458
		2016	8.588.657.399.844	12,93392528
		2017	9.090.114.779.884	12,95856937
		2018	9.037.791.429.166	12,95606231
12	Kepulauan Meranti	2014	3.345.675.887.451	12,52448387
		2015	2.628.361.952.797	12,41968517
		2016	2.780.338.676.667	12,4440977
		2017	2.686.578.777.193	12,42919958
		2018	2.557.715.355.674	12,40785221

Berdasarkan tabel 5.2, hampir secara keseluruhan Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau periode 2014-2018 memiliki ukuran daerah yang sama, hanya saja pada Kabupaten Bengkalis tahun 2014 memiliki ukuran daerah yang lebih besar dibanding Kota/Kabupaten lainnya yaitu sebesar Log 13,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 5.1

Ukuran Daerah



Berdasarkan grafik 5.1, menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun pada masing-masing Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau selama periode tahun 2014-2018.

5.1.2 Tingkat Ketergantungan dengan Pusat

Tingkat ketergantungan dengan pusat yang dinyatakan dalam besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi umum adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten dari pemerintah Pusat Provinsi Riau. Hasil analisis DAU masing-masing Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau periode 2014-2018 pada tabel berikut:

Tabel 5.3

Dana Alokasi Umum Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau periode 2014-2018

No	Kota/Kabupaten	Tahun	DAU (Rp)	Perkembangan	
				Nominal (Rp)	%
1	Pekanbaru	2014	809.987.156.000		
		2015	776.411.106.000	-33.576.050.000	9,58
		2016	789.341.355.000	12.930.249.000	10,16
		2017	791.327.481.000	1.986.126.000	10,02
		2018	798.138.148.000	6.810.667.000	10,08
2	Dumai	2014	359.840.493.000		
		2015	343.254.509.000	-16.585.984.000	9,53
		2016	406.116.504.000	62.861.995.000	11,83
		2017	408.643.780.000	2.527.276.000	10,06
		2018	427.188.089.000	18.544.309.000	10,45
3	Kuantan Singingi	2014	618.821.044.000		
		2015	602.796.123.000	-16.024.921.000	9,74
		2016	600.665.668.000	-2.130.455.000	9,96
		2017	600.606.026.000	-59.642.000	9,99
		2018	618.561.583.000	17.955.557.000	10,29
4	Indragiri Hilir	2014	847.860.750.000		
		2015	841.133.812.000	-6.726.938.000	9,92
		2016	898.404.765.000	57.270.953.000	10,68
		2017	895.989.730.000	-2.415.035.000	9,97

No	Kota/Kabupaten	Tahun	DAU (Rp)	Perkembangan	
				Nominal (Rp)	%
		2018	918.602.922.000	22.613.192.000	10,25
5	Indragiri Hulu	2014	631.168.431.000		
		2015	609.433.272.000	-21.735.159.000	9,65
		2016	629.877.226.000	20.443.954.000	10,33
		2017	630.242.304.000	365.078.000	10,00
		2018	646.609.433.000	16.367.129.000	10,25
6	Pelalawan	2014	536.384.455.000		
		2015	518.942.022.000	-17.442.433.000	9,67
		2016	596.801.161.000	77.859.139.000	11,50
		2017	598.159.971.000	1.358.810.000	10,02
		2018	610.599.637.000	12.439.666.000	10,20
7	Siak	2014	276.191.935.000		
		2015	185.019.984.000	-91.171.951.000	6,69
		2016	248.935.486.000	63.915.502.000	13,45
		2017	264.714.000.000	15.778.514.000	10,63
		2018	323.293.793.000	58.579.793.000	12,21
8	Kampar	2014	742.583.673.000		
		2015	671.809.364.000	-70.774.309.000	9,04
		2016	721.681.861.000	49.872.497.000	10,74
		2017	728.616.246.000	6.934.385.000	10,09
		2018	774.370.036.000	45.753.790.000	10,62
9	Rokan Hulu	2014	571.522.210.000		
		2015	570.751.535.000	-770.675.000	9,98
		2016	588.877.265.720	18.125.730.720	10,31
		2017	640.900.326.000	52.023.060.280	10,88
		2018	654.291.480.000	13.391.154.000	10,20
10	Rokan Hilir	2014	413.982.787.000		
		2015	320.515.985.000	-93.466.802.000	7,74
		2016	347.000.097.000	26.484.112.000	10,82
		2017	364.151.812.000	17.151.715.000	10,49
		2018	432.022.856.000	67.871.044.000	11,86
11	Bengkalis	2014	60.777.928.000		
		2015	85.777.928.000	25.000.000.000	14,11
		2016	100.894.558.000	15.116.630.000	11,76
		2017	345.070.716.000	244.176.158.000	34,20
		2018	323.293.793.000	-21.776.923.000	9,36
12	Kepulauan Meranti	2014	371.289.172.000		
		2015	347.404.428.000	-23.884.744.000	9,35
		2016	371.690.224.000	24.285.796.000	10,69

No	Kota/Kabupaten	Tahun	DAU (Rp)	Perkembangan	
				Nominal (Rp)	%
		2017	375.396.779.000	3.706.555.000	10,09
		2018	403.426.873.000	28.030.094.000	10,74

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 5.3, dapat diketahui realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) per periode 2014-2018 dimana terdapat kenaikan DAU yang signifikan terjadi pada Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 sebesar Rp 244.176.158.000,00 atau sebesar 34,20%. Sedangkan DAU yang terendah diperoleh pada Kabupaten Siak tahun 2015 sebesar 6,69%.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitrisari (2012) mengatakan bahwa tingkat “ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan”. Demikian pada penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah”. Dana Alokasi Umum untuk setiap kabupaten/kota dapat dilihat melalui pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Variabel tingkat ketergantungan diukur dengan rumus:

$$\text{Tingkat Ketergantungan dengan Pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Berdasarkan rumusan di atas, maka tingkat ketergantungan pada pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4

Tingkat Ketergantungan dengan Pusat periode 2014-2018

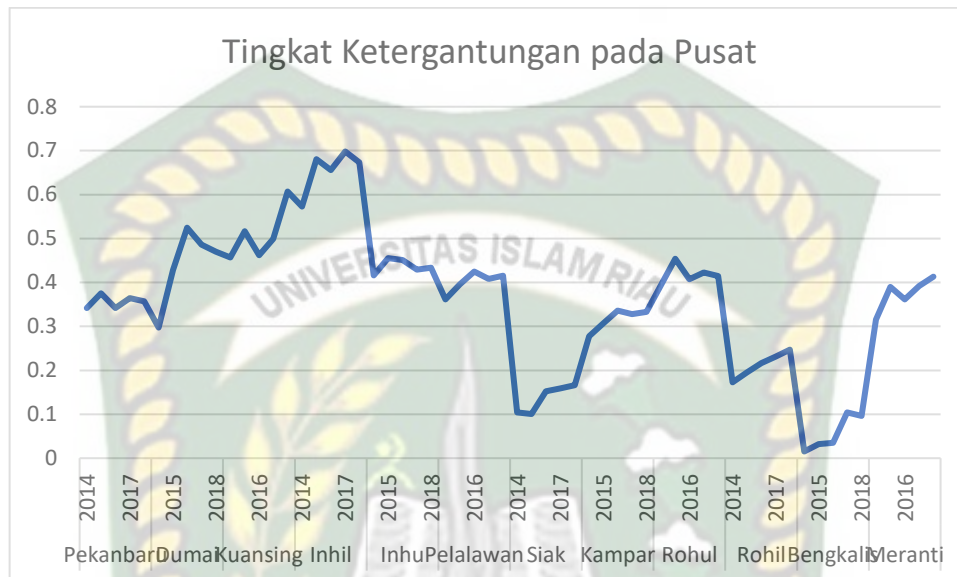
No	Kota/Kabupaten	Tahun	DAU (Rp)	Total Realisasi Pendapatan (Rp)	Tingkat Ketergantungan pada Pusat
1	Pekanbaru	2014	809.987.156.000	2.370.458.276.775	0,341700659
		2015	776.411.106.000	2.067.360.103.318	0,375556781
		2016	789.341.355.000	2.309.668.464.805	0,341755264
		2017	791.327.481.000	2.171.590.365.092	0,364399978
		2018	798.138.148.000	2.235.018.502.739	0,357105835
2	Dumai	2014	359.840.493.000	1.209.794.037.361	0,297439466
		2015	343.254.509.000	801.787.267.648	0,428111699
		2016	406.116.504.000	774.207.457.695	0,524557727
		2017	408.643.780.000	840.223.272.771	0,486351418
		2018	427.188.089.000	909.581.771.656	0,469653309
3	Kuantan Singingi	2014	618.821.044.000	1.353.651.314.801	0,457149516
		2015	602.796.123.000	1.167.329.273.825	0,516389108
		2016	600.665.668.000	1.300.190.561.344	0,461982794
		2017	600.606.026.000	1.203.875.283.864	0,498893892
		2018	618.561.583.000	1.019.448.411.906	0,606761044
4	Indragiri Hilir	2014	847.860.750.000	1.479.872.269.672	0,572928331
		2015	841.133.812.000	1.235.567.369.318	0,68076726
		2016	898.404.765.000	1.370.286.058.678	0,655633004
		2017	895.989.730.000	1.283.445.695.586	0,698112692
		2018	918.602.922.000	1.363.810.136.635	0,673556309
5	Indragiri Hulu	2014	631.168.431.000	1.515.887.532.834	0,416368904
		2015	609.433.272.000	1.338.867.894.231	0,455185515
		2016	629.877.226.000	1.397.303.672.385	0,450780484
		2017	630.242.304.000	1.468.670.557.404	0,429124354
		2018	646.609.433.000	1.490.528.163.592	0,433812288
6	Pelalawan	2014	536.384.455.000	1.485.407.190.108	0,361102638
		2015	518.942.022.000	1.311.303.333.835	0,395745217
		2016	596.801.161.000	1.404.762.616.079	0,424841289
		2017	598.159.971.000	1.465.379.972.442	0,408194449
		2018	610.599.637.000	1.469.020.695.865	0,415650806
7	Siak	2014	276.191.935.000	2.645.953.853.577	0,104382748
		2015	185.019.984.000	1.839.092.346.653	0,100603966
		2016	248.935.486.000	1.638.282.230.688	0,151949085
		2017	264.714.000.000	1.666.987.143.295	0,158797865

No	Kota/Kabupaten	Tahun	DAU (Rp)	Total Realisasi Pendapatan (Rp)	Tingkat Ketergantungan
		2018	323.293.793.000	1.945.677.358.330	0,166160022
8	Kampar	2014	742.583.673.000	2.673.576.006.310	0,277749228
		2015	671.809.364.000	2.188.847.384.530	0,306923803
		2016	721.681.861.000	2.147.366.658.736	0,336077613
		2017	728.616.246.000	2.220.571.511.817	0,328121045
		2018	774.370.036.000	2.327.551.167.364	0,33269732
9	Rokan Hulu	2014	571.522.210.000	1.451.845.900.952	0,393652115
		2015	570.751.535.000	1.256.340.538.821	0,454296839
		2016	588.877.265.720	1.445.493.027.548	0,40738852
		2017	640.900.326.000	1.515.720.732.291	0,422835363
		2018	654.291.480.000	1.577.823.855.313	0,414679673
10	Rokan Hilir	2014	413.982.787.000	2.392.184.637.821	0,173056369
		2015	320.515.985.000	1.638.887.669.271	0,195569221
		2016	347.000.097.000	1.601.526.553.983	0,216668338
		2017	364.151.812.000	1.576.237.858.902	0,231025927
		2018	432.022.856.000	1.749.422.184.181	0,246951742
11	Bengkalis	2014	60.777.928.000	3.985.029.241.140	0,015251564
		2015	85.777.928.000	2.684.515.038.566	0,031952858
		2016	100.894.558.000	2.880.599.611.607	0,03502554
		2017	345.070.716.000	3.320.782.679.458	0,103912466
		2018	323.293.793.000	3.359.727.964.530	0,096226182
12	Kepulauan Meranti	2014	371.289.172.000	1.178.137.979.065	0,315149141
		2015	347.404.428.000	890.638.858.990	0,39006206
		2016	371.690.224.000	1.028.514.377.491	0,36138554
		2017	375.396.779.000	957.600.359.516	0,39201821
		2018	403.426.873.000	975.871.356.692	0,413401695

Berdasarkan tabel 5.4, terdapat beberapa Kabupaten ataupun Kota di Provinsi Riau yang masih ketergantungan pada pusat seperti Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2014-2018 sangat ketergantungan dengan pusat dengan rasio nilai 0,69. Sedangkan rasio nilai ketergantungan yang terendah dimiliki oleh Kabupaten Siak periode tahun 2014-2018 dengan rasio nilai 0,1. Untuk lebih jelasnya, dapat diketahui lebih lengkap pada grafik berikut:

Gambar 5.2

Tingkat Ketergantungan dengan Pusat



5.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja daerah yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin besar belanja daerah maka semakin banyak pula pembangunan infrastruktur dan sarana di daerah, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang artinya kinerja daerah tersebut akan lebih baik.

Berdasarkan Permendagri No 23 Tahun 2014 Belanja Daerah merupakan: Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahun yang bersangkutan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan menyatakan rasio Belanja Daerah terhadap total belanja daerah mencerminkan

porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Daerah. Realisasi Belanja Daerah akan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Maka variabel Belanja Daerah dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Belanja}}$$

Adapun belanja daerah masing-masing Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau periode 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 5.5

Belanja Daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau periode 2014-2018

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Rasio
1	Pekanbaru	2014	2.841.843.665.920	2.342.869.326.041	1,212976
		2015	3.093.390.463.789	2.536.343.613.005	1,219626
		2016	2.425.866.099.699	2.025.563.454.217	1,197625
		2017	2.629.290.035.710	2.152.172.723.977	1,221691
		2018	2.639.311.006.654	2.220.359.504.219	1,188686
2	Dumai	2014	1.395.354.175.489	1.291.017.065.761	1,080818
		2015	1.214.500.322.347	1.044.124.971.350	1,163175
		2016	1.259.200.809.590	1.114.972.852.847	1,129356
		2017	1.280.663.488.811	1.203.255.387.073	1,064332
		2018	1.139.723.187.494	1.110.153.784.810	1,026635
3	Kuantan Singingi	2014	1.570.535.112.520	1.380.113.615.130	1,137975
		2015	1.585.886.765.414	1.405.457.090.259	1,128378
		2016	1.413.155.896.952	1.125.604.448.499	1,255464
		2017	1.215.076.587.177	1.101.404.863.220	1,103206
		2018	1.181.683.178.436	1.093.477.719.930	1,080665
4	Indragiri Hilir	2014	2.151.707.162.702	1.714.460.853.444	1,255034
		2015	2.276.637.546.507	1.819.091.879.274	1,251524
		2016	2.383.660.387.741	1.986.130.898.838	1,200153
		2017	2.282.028.445.759	2.010.028.969.807	1,135321
		2018	2.176.909.698.075	1.800.129.602.824	1,209307

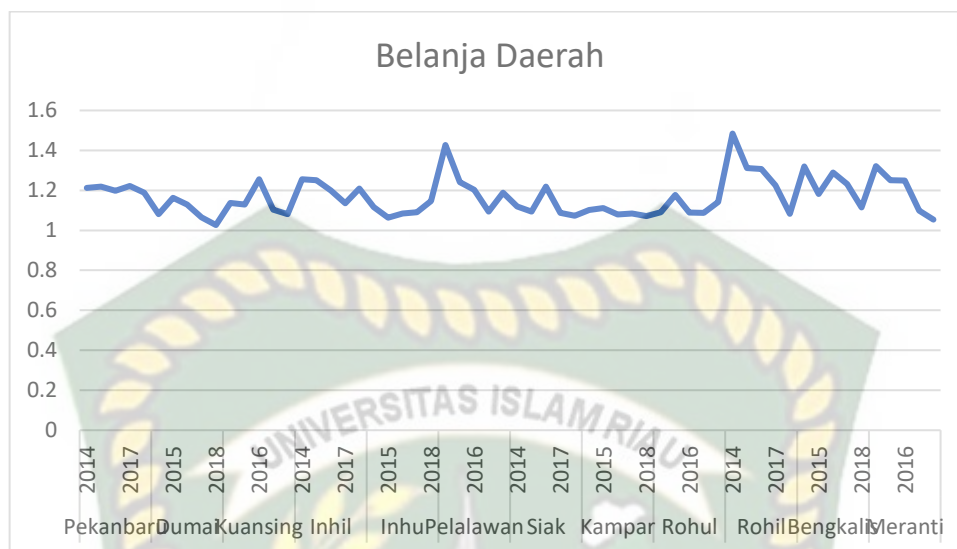
No	Kota/Kabupaten	Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Rasio
5	Indragiri Hulu	2014	1.937.816.222.680	1.736.011.214.054	1,116246
		2015	1.692.010.794.824	1.591.664.916.196	1,063045
		2016	1.382.802.799.524	1.275.014.048.823	1,084539
		2017	1.311.394.481.520	1.202.877.579.512	1,090214
		2018	1.244.141.647.619	1.084.430.710.183	1,147276
6	Pelalawan	2014	2.103.563.912.196	1.473.927.741.146	1,427183
		2015	2.091.254.904.353	1.684.164.043.497	1,241717
		2016	1.971.159.582.358	1.639.133.494.244	1,202562
		2017	1.568.996.070.349	1.434.664.897.985	1,093632
		2018	1.520.456.427.369	1.279.027.719.741	1,18876
7	Siak	2014	2.965.856.282.409	2.647.677.640.488	1,120173
		2015	2.715.910.995.850	2.483.343.054.893	1,093651
		2016	1.854.894.762.287	1.520.903.908.086	1,2196
		2017	1.556.956.970.640	1.431.751.100.627	1,087449
		2018	1.591.557.038.748	1.482.504.577.890	1,07356
8	Kampar	2014	2.756.358.375.162	2.502.734.681.741	1,101339
		2015	2.826.740.184.796	2.543.965.911.226	1,111155
		2016	2.550.025.390.123	2.360.507.515.750	1,080287
		2017	2.421.154.921.809	2.232.826.396.846	1,084345
		2018	2.323.932.027.652	2.168.293.382.294	1,071779
9	Rokan Hulu	2014	1.499.372.163.886	1.374.147.400.556	1,091129
		2015	1.616.827.705.918	1.373.078.183.602	1,17752
		2016	1.520.486.893.473	1.396.524.231.468	1,088765
		2017	1.690.835.249.160	1.555.198.035.271	1,087215
		2018	1.804.484.969.920	1.580.180.760.758	1,141948
10	Rokan Hilir	2014	2.703.339.346.356	1.821.224.190.581	1,484353
		2015	2.793.538.647.705	2.128.433.393.491	1,312486
		2016	2.153.531.536.183	1.647.388.588.492	1,30724
		2017	1.901.811.403.654	1.552.458.906.929	1,225032
		2018	1.512.584.327.158	1.396.852.136.683	1,082852
11	Bengkalis	2014	4.677.245.382.219	3.544.642.029.555	1,319525
		2015	5.376.051.630.077	4.545.686.271.366	1,182671
		2016	4.056.227.263.166	3.146.734.562.970	1,289027
		2017	3.972.064.330.460	3.223.929.573.253	1,232057
		2018	3.066.809.696.144	2.749.971.464.672	1,115215
12	Kepulauan Meranti	2014	1.646.262.156.275	1.245.423.194.179	1,32185
		2015	1.329.271.507.049	1.062.143.766.979	1,251499
		2016	1.170.370.178.166	937.405.807.693	1,24852
		2017	923.138.882.249	839.738.969.539	1,099316

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Rasio
		2018	939.674.970.145	891.015.461.270	1,054611

Berdasarkan pada tabel 5.5, dapat diketahui mengenai belanja daerah masing-masing Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau periode tahun 2014-2018. Sebagaimana terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki belanja daerah yang besar seperti Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 dengan jumlah Rp 5.376.051.630.077,00 yang memiliki total realisasi belanjanya sebesar Rp 4.545.686.271.366,00 sehingga memiliki rasio sebesar 1,18. Sedangkan Kabupaten yang memiliki belanja yang rendah yaitu Kepulauan Meranti periode tahun 2017 yaitu sebesar Rp 923.138.882.249,0 dengan total realisasi belanja Rp 839.738.969.539,00 dengan rasio sebesar 1,09. Untuk lebih jelasnya secara keseluruhan, dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 5.3

Belanja Daerah



5.1.4 Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah adalah variabel dependen pada penelitian ini. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dai input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasio, maka semakin baik tingkat efisiensinya, begitu pula sebaliknya. Semakin besar rasio, maka akan semakin buruk tingkat efisiensinya. Rumusan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah adalah dengan melihat efisiensi kinerjanya itu sendiri dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisie Kinerja} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}}$$

Adapun kinerja pemerintah daerah masing-masing Kota/Kabupaten Se-
Provinsi Riau periode tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 5.6

Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau Tahun 2014-2018

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Total Realisasi Belanja (Rp)	Total Realisasi Pendapatan (Rp)
1	Pekanbaru	2014	2.342.869.326.041	2.370.458.276.775
		2015	2.536.343.613.005	2.067.360.103.318
		2016	2.025.563.454.217	2.309.668.464.805
		2017	2.152.172.723.977	2.171.590.365.092
		2018	2.220.359.504.219	2.235.018.502.739
2	Dumai	2014	1.291.017.065.761	1.209.794.037.361
		2015	1.044.124.971.350	801.787.267.648
		2016	1.114.972.852.847	774.207.457.695
		2017	1.203.255.387.073	840.223.272.771
		2018	1.110.153.784.810	909.581.771.656
3	Kuantan Singingi	2014	1.380.113.615.130	1.353.651.314.801
		2015	1.405.457.090.259	1.167.329.273.825
		2016	1.125.604.448.499	1.300.190.561.344
		2017	1.101.404.863.220	1.203.875.283.864
		2018	1.093.477.719.930	1.019.448.411.906
4	Indragiri Hilir	2014	1.714.460.853.444	1.479.872.269.672
		2015	1.819.091.879.274	1.235.567.369.318
		2016	1.986.130.898.838	1.370.286.058.678
		2017	2.010.028.969.807	1.283.445.695.586
		2018	1.800.129.602.824	1.363.810.136.635
5	Indragiri Hulu	2014	1.736.011.214.054	1.515.887.532.834
		2015	1.591.664.916.196	1.338.867.894.231
		2016	1.275.014.048.823	1.397.303.672.385
		2017	1.202.877.579.512	1.468.670.557.404
		2018	1.084.430.710.183	1.490.528.163.592
6	Pelalawan	2014	1.473.927.741.146	1.485.407.190.108
		2015	1.684.164.043.497	1.311.303.333.835
		2016	1.639.133.494.244	1.404.762.616.079
		2017	1.434.664.897.985	1.465.379.972.442
		2018	1.279.027.719.741	1.469.020.695.865
7	Siak	2014	2.647.677.640.488	2.645.953.853.577

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Total Realisasi	Total Realisasi
			Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)
		2015	2.483.343.054.893	1.839.092.346.653
		2016	1.520.903.908.086	1.638.282.230.688
		2017	1.431.751.100.627	1.666.987.143.295
		2018	1.482.504.577.890	1.945.677.358.330
		2014	2.502.734.681.741	2.673.576.006.310
8	Kampar	2015	2.543.965.911.226	2.188.847.384.530
		2016	2.360.507.515.750	2.147.366.658.736
		2017	2.232.826.396.846	2.220.571.511.817
		2018	2.168.293.382.294	2.327.551.167.364
		2014	1.374.147.400.556	1.451.845.900.952
9	Rokan Hulu	2015	1.373.078.183.602	1.256.340.538.821
		2016	1.396.524.231.468	1.445.493.027.548
		2017	1.555.198.035.271	1.515.720.732.291
		2018	1.580.180.760.758	1.577.823.855.313
		2014	1.821.224.190.581	2.392.184.637.821
10	Rokan Hilir	2015	2.128.433.393.491	1.638.887.669.271
		2016	1.647.388.588.492	1.601.526.553.983
		2017	1.552.458.906.929	1.576.237.858.902
		2018	1.396.852.136.683	1.749.422.184.181
		2014	3.544.642.029.555	3.985.029.241.140
11	Bengkalis	2015	4.545.686.271.366	2.684.515.038.566
		2016	3.146.734.562.970	2.880.599.611.607
		2017	3.223.929.573.253	3.320.782.679.458
		2018	2.749.971.464.672	3.359.727.964.530
		2014	1.245.423.194.179	1.178.137.979.065
12	Kepulauan Meranti	2015	1.062.143.766.979	890.638.858.990
		2016	937.405.807.693	1.028.514.377.491
		2017	839.738.969.539	957.600.359.516
		2018	891.015.461.270	975.871.356.692

Berdasarkan tabel 5.6, terdapat efisiensi kinerja masing-masing Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau tahun 2014-2018. Sebagaimana efisiensi kinerja yang tertinggi dengan melihat realisasi belanja dan pendapatannya adalah Kota Pekanbaru dengan total realisasi belanja pada tahun 2018 sebesar Rp 2.220.359.504.219,00 dan total realisasi pendapatan di tahun tersebut sebesar Rp

2.235.018.502.739,00. Sedangkan efisiensi kinerja pemerintah yang terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2017 yaitu sebesar pada angka Rp 839.738.969.539,00 dengan total realisasi pendapatan di tahun tersebut sebesar Rp 957.600.359.516,00. Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun kinerja pemerintah daerah Se-Provinsi Riau tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 5.7

Kinerja Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau Tahun 2014-2018

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Kinerja Pemerintah Daerah	Keterangan
1	Pekanbaru	2014	0,988361343	Rendah
		2015	1,226851388	Sedang
		2016	0,876993164	Rendah
		2017	0,991058332	Rendah
		2018	0,993441218	Rendah
2	Dumai	2014	1,067137898	Sedang
		2015	1,302246885	Sedang
		2016	1,440147394	Sedang
		2017	1,432066245	Sedang
		2018	1,22051015	Sedang
3	Kuantan Singingi	2014	1,019548831	Sedang
		2015	1,203993699	Sedang
		2016	0,865722673	Rendah
		2017	0,91488286	Rendah
		2018	1,072617022	Sedang
4	Indragiri Hilir	2014	1,158519481	Sedang
		2015	1,472272516	Sedang
		2016	1,44942794	Sedang
		2017	1,566119219	Sedang
		2018	1,319926839	Sedang
5	Indragiri Hulu	2014	1,14521109	Sedang
		2015	1,188814014	Sedang

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Kinerja	Keterangan
			Pemerintah	
		2016	0,912481713	Rendah
		2017	0,81902478	Rendah
		2018	0,72754795	Rendah
6	Pelalawan	2014	0,99227185	Rendah
		2015	1,284343599	Sedang
		2016	1,166840202	Sedang
		2017	0,979039515	Rendah
		2018	0,870666917	Rendah
7	Siak	2014	1,00065148	Sedang
		2015	1,350309058	Sedang
		2016	0,928352807	Rendah
		2017	0,858885509	Rendah
		2018	0,761947798	Rendah
8	Kampar	2014	0,936100068	Rendah
		2015	1,162239967	Sedang
		2016	1,099256853	Sedang
		2017	1,005518798	Sedang
		2018	0,931577107	Rendah
9	Rokan Hulu	2014	0,946482956	Rendah
		2015	1,092918792	Sedang
		2016	0,966123118	Rendah
		2017	1,026045235	Sedang
		2018	1,00149377	Sedang
10	Rokan Hilir	2014	0,761322584	Rendah
		2015	1,298706088	Sedang
		2016	1,02863645	Sedang
		2017	0,984914109	Rendah
		2018	0,798464858	Rendah
11	Bengkalis	2014	0,889489591	Rendah
		2015	1,693298866	Sedang
		2016	1,092388734	Sedang
		2017	0,970834253	Rendah
		2018	0,818510157	Rendah
12	Kepulauan Meranti	2014	1,057111149	Sedang
		2015	1,192563918	Sedang
		2016	0,91141731	Rendah
		2017	0,876920065	Rendah
		2018	0,913046023	Rendah

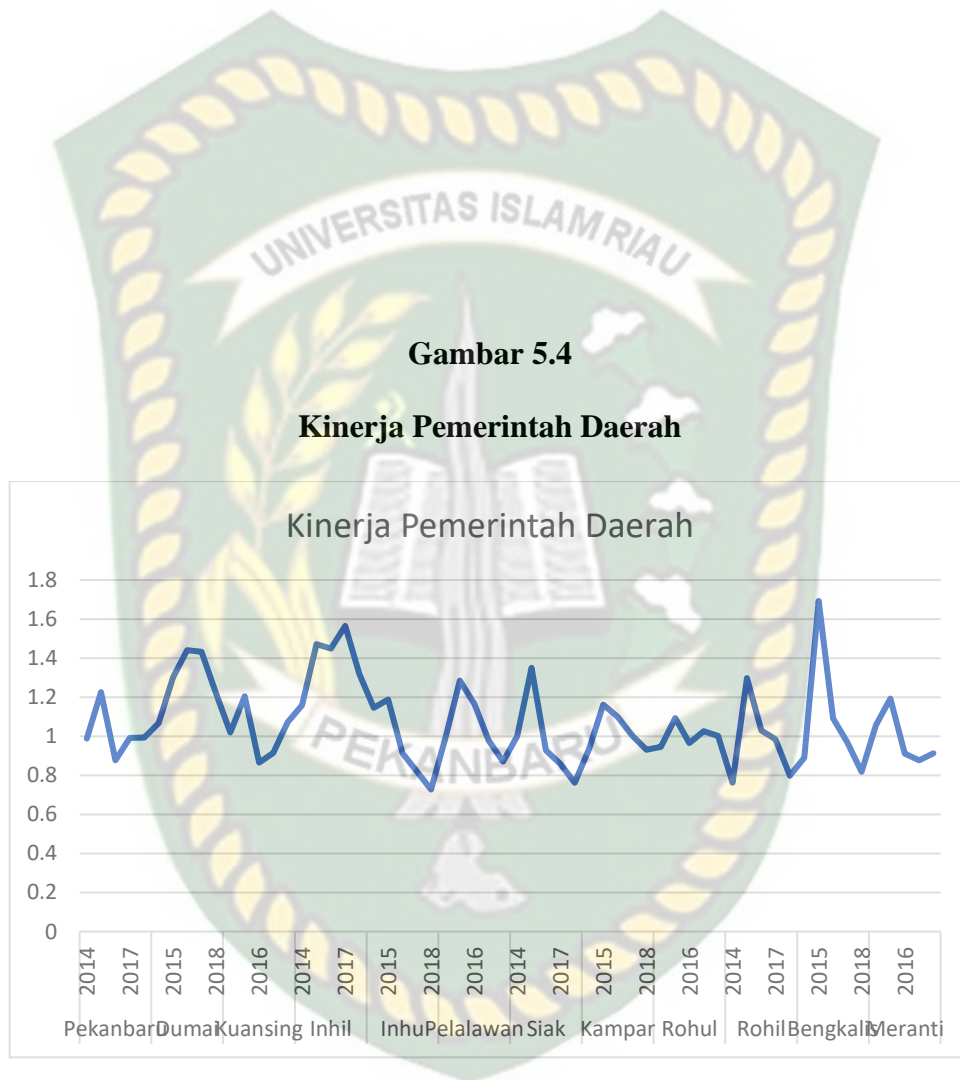
Berdasarkan tabel 5.7, adapun kinerja pemerintah daerah masing-masing Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau tahun 2014-2018. Skor kinerja pemerintah daerah kota yang berasal dari Laporan Hasil Evaluasi Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan LPPD tahun 2014-2018 tingkat nasional dengan *range* nilai 0-4, dan kualifikasi penilaian tersebut terbagi dalam empat penilaian, yaitu:

- 1) 3,01-4,00 = Sangat Tinggi
- 2) 2,01-3,00 = Tinggi
- 3) 1,01-2,00 = Sedang
- 4) 0,00-1,00 = Rendah

Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian *portofolio* secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD tahun 2014-2018 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi pemingkatan kinerja Pemda ini baru pertama kali dilakukan untuk LPPD tahun anggaran 2007 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 2009 oleh Kementerian Dalam Negeri. Kinerja Pemerintah Daerah juga dapat dikatakan bagaimana pencapaian pemerintah daerah terhadap target-target dan SOP yang sudah ditetapkan ataupun direncanakan.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2014-2018 memiliki kinerja dengan kategori “sedang” dimana hal tersebut merupakan prestasi tertinggi dari Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau lainnya. Sedangkan Kota/Kabupaten yang memiliki kinerja yang

paling rendah yaitu pada Kabupaten Rokan Hilir tahun 2014 sebesar 0,76. Untuk lebih jelasnya secara keseluruhan, dapat dilihat pada grafik berikut:



5.2 Hasil Analisis Data

Setelah menjabarkan hasil perhitungan secara deskriptif pada pembahasan sebelumnya, selanjutnya akan dibahas mengenai perhitungan secara inferensial statistik dengan ketentuan masing-masing pengujiannya dengan menggunakan bantuan program SPSS, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tiap sub bab berikut.

5.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu data harus melewati serangkaian pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

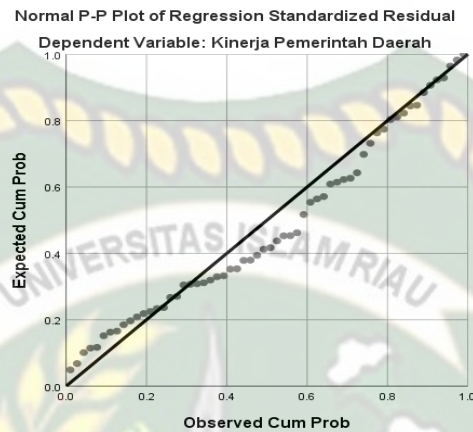
5.2.1.1 Hasil Uji Normalitas

Pada pengujian normalitas data terdapat berbagai cara dalam pengujiannya yaitu salah satunya dengan melihat grafik normal *p-plot of regression standardized residual* nya. Alat diagnostik yang digunakan untuk memeriksa data yang memiliki distribusi normal adalah plot peluang (*normal probability plot*). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati modal. Untuk mendeteksi normalitas dapat melihat grafik normal P-P Plot of Regression standardizwd Residual. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan antara lain:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5.5

Hasil Uji Normalitas Data Grafik P-Plot



Berdasarkan Gambar 5.5 diatas dapat dilihat bahwa terlihat titik-titik menyebar berhimpit sekitar garis diagonal, maka nilai residual tersebut terdistribusi normal. Untuk melakukan pengujian normalitas yang lebih baik dapat menggunakan uji statistik dengan metode yang lainnya. Selain melihat grafik normal *plot* juga perlu pengujian normalitas yang kedua yaitu dengan cara uji statistik non parametrik *Kolmogrov-Smirnov (K-S)* yang hasil ujinya terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.8

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov-Z Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Ketertgantungan dengan Pusat
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.3596
	Std. Deviation	.16208
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.082
	Negative	-.106
Test Statistic		.106

Asymp. Sig. (2-tailed)	.088 ^c
------------------------	-------------------

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Syarat dinyatakan normal dari uji *Kolmogorov-smirnov* ini yaitu dengan ketentuan bahwa nilai *asyp. Sig* > 0.05. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* adalah 0,106 dengan signifikansi 0.088 yang artinya di atas nilai signifikan dari 0.05 ($0.088 > 0.05$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima dengan interpretasi data residual berdistribusi normal dan data pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya akan dilakukan pengujian multikolinearitas.

5.2.1.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika $VIF < 10$ dan nilai tolerance > 0,1 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas dan jika nilai VIF > 10 maka terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi (Ghozali, 2018). Berikut ini adalah hasil pengujian multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 5.9

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Ukuran Daerah	.336	2.973
Ketergantungan dengan Pusat	.387	2.582
Belanja Daerah	.801	1.248

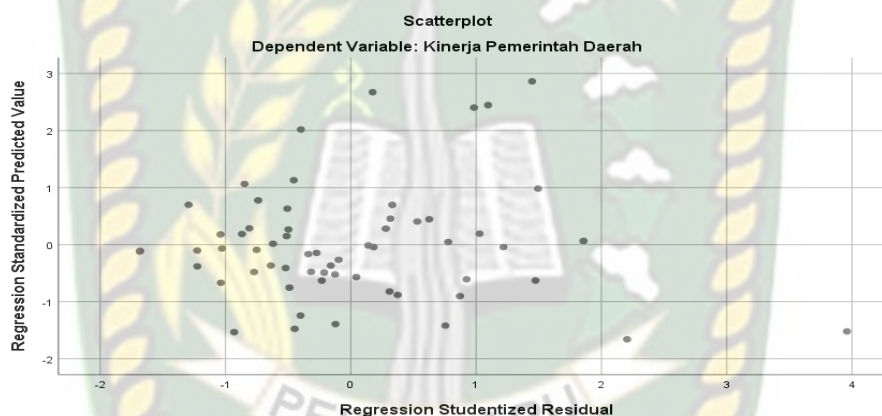
Berdasarkan tabel 5.9, dapat diketahui bahwa nilai VIF pada variabel Ukuran Daerah (X1) sebesar 2,973, Ketergantungan dengan Pusat (X2) sebesar 2,582 dan Belanja Daerah (X3) sebesar 1,248 yang artinya ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai VIF yang dibawah 10, maka data dinyatakan memenuhi salah satu asumsi dari uji multikolinearitas, namun untuk melihat bahwa data memang benar-benar terbebas dari multikolinearitas maka juga perlu diperhatikan dari nilai *tolerance* nya yaitu pada ketiga variabel tersebut sebesar 0.336 untuk variabel Ukuran Daerah (X1), 0,387 untuk Ketergantungan dengan Pusat (X2) dan 0,801 untuk Belanja Daerah (X3) yang artinya kedua variabel tersebut menunjukkan nilai *tolerance* diatas 0,1 yang artinya data tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen sehingga dapat dilanjutkan pengujian lebih lanjut yaitu uji heteroskedastisitas.

5.2.1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada

grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot



Berdasarkan gambar 5.6, dapat dilihat bahwa grafik *scatterplot* menunjukkan hasil data tidak membentuk pola dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada model tersebut tidak terdapat problem heteroskedastisitas. Modal regresi yang baik adalah data yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

5.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t yang mana untuk menguji setiap variabel independen yang memiliki pengaruh atau tidaknya dengan variabel dependen. Kemudian uji hipotesis lainnya menggunakan uji f

yang bertujuan melihat dengan uji secara simultan. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan satu persatu mengenai pengujian tersebut.

5.2.2.1 Hasil Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dalam hal probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka hasilnya signifikan, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas:

- a. Jika p value > 0.05 maka hipotesis ditolak.
- b. Jika p value < 0.05 maka hipotesis diterima.

Tabel 5.10

Hasil Uji t

	t	Sig. (2-tailed)
Ukuran Daerah	534.920	.000
Ketergantungan dengan Pusat	17.184	.000
Belanja Daerah	96.067	.000
Kinerja Pemerintah Daerah	39.212	.000

Berdasarkan tabel 5.10, dapat diketahui signifikan dari masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi < 0.05 . Artinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ukuran Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu hipotesis H1 diterima dengan kaidah keputusan yaitu

semakin besar ukuran daerah maka akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah.

2. Ketergantungan dengan Pusat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu hipotesis H2 diterima dengan kaidah keputusan yaitu semakin tergantung pemerintah daerah dengan pusat maka akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah tersebut.
3. Belanja Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu hipotesis H3 diterima dengan kaidah keputusan yaitu semakin besar belanja daerah maka akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah.

5.2.2.2 Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel independen dengan variabel dependen. Dengan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas :

- a. Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka hipotesis diterima
- b. Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka hipotesis ditolak

Tabel 5.11

Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.403	3	.134	3.389	.024 ^b
	Residual	2.219	56	.040		
	Total	2.621	59			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Ketergantungan dengan Pusat, Ukuran Daerah

Untuk menginterpretasikan data pada tabel di atas yaitu dengan mengambil keputusan berdasarkan probabilitasnya dengan melihat nilai signifikan < 0.05 . Artinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Ukuran Daerah, Ketergantungan dengan Pusat dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu H4 diterima dengan kaidah keputusan yaitu semakin tinggi Ukuran Daerah, Ketergantungan dengan Pusat dan Belanja Daerah maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau tahun 2014-2018.

5.2.2.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka diperlukan uji koefisien determinasi atau *r-square*. Koefisien Determinasi (R^2) adalah suatu titik nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan variasi nilai variabel independen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun hasil uji koefisien determinasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.12

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.392 ^a	.654	.108	.19904	1.520

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Ketergantungan dengan Pusat, Ukuran Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 5.12, dapat dilihat nilai *r-square* dari penelitian ini menunjukkan angka 0.654. Artinya, ada pengaruh sebesar 65.4% yang diberikan dari variabel Ukuran Daerah, Ketergantungan dengan Pusat dan Belanja Daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau. Jadi, ada 34.6% lainnya yang akan disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

5.2.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai kedua variabel tersebut digunakanlah metode regresi linear berganda. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3$$

Keterangan:

Y : Kinerja Pemerintah Daerah

X₁ : Ukuran Daerah

X₂ : Ketergantungan dengan Pusat

X₃ : Belanja Daerah

B₁B₂B₃ : Koefisien regresi

a : Konstanta

Tabel 5.13**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized
		B	Std. Error	Coefficients Beta
1	(Constant)	-4.280	3.031	
	Ukuran Daerah	.406	.245	.351
	Ketergantungan dengan Pusat	.773	.257	.594
	Belanja Daerah	-.033	.307	-.015

Berdasarkan tabel 5.13, maka dapat disusun persamaan regresinya sebagai

berikut:

$$Y = -4.280 + 0.406 X_1 + 0.773 X_2 + -0.033 X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -4.280, artinya jika variabel Ukuran Daerah, Ketergantungan dengan Pusat dan Belanja Daerah nilainya adalah 0, maka variabel kinerja pemerintah daerah nilainya adalah -4.280.
2. Variabel Ukuran Daerah (X₁) memiliki pengaruh positif sebesar 0.406, artinya jika Ukuran Daerah besar maka kinerja pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.406, begitu sebaliknya jika kecil maka

akan menurunkan kinerja pemerintah daerah, dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.

3. Variabel Ketergantungan dengan Pusat (X2) memiliki pengaruh positif sebesar 0.773, artinya jika Ketergantungan dengan Pusat sangat kuat maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0.773, begitu sebaliknya jika ketergantungan dengan pusat kecil maka akan menurunkan kinerja pemerintah daerah, dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.
4. Variabel Belanja Daerah (X3) memiliki pengaruh positif sebesar -0.033, artinya jika belanja daerah besar maka kinerja pemerintah daerah akan menurun sebesar -0.033, begitu sebaliknya jika belanja daerah kecil maka akan menaikkan kinerja pemerintah daerah, dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu hipotesis H1 diterima dengan kaidah keputusan yaitu semakin besar ukuran daerah maka akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah.
2. Ketergantungan dengan Pusat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu hipotesis H2 diterima dengan kaidah keputusan yaitu semakin tergantung pemerintah daerah dengan pusat maka akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah tersebut.
3. Belanja Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu hipotesis H3 diterima dengan kaidah keputusan yaitu semakin besar belanja daerah maka akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah.
4. Ukuran Daerah, Ketergantungan dengan Pusat dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu H4 diterima dengan kaidah keputusan yaitu semakin tinggi Ukuran Daerah, Ketergantungan dengan Pusat dan Belanja Daerah

maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau tahun 2014-2018.

5. Ada pengaruh sebesar 65.4% yang diberikan dari variabel Ukuran Daerah, Ketergantungan dengan Pusat dan Belanja Daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau. Jadi, ada 34.6% lainnya yang akan disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, maka diajukan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Riau dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai Ukuran Daerah, Ketergantungan dengan Pusat dan Belanja Daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dan juga sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang ikut mempengaruhi kinerja pemerintah daerah seperti tingkat kekayaan daerah yang dianggap relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Syukur. M. 1988. *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Ghozali, Imam 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (edisi sembilan)* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Analisis Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi III, Cetakan I , Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN, Yogyakarta.
- Romney. Marshall B dan Paul John Steinbart. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta

Jurnal dan Skripsi:

- Ara, Samuel Christian. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba*. JAFFA, 04 (1) : 1 - 17.
- Arfian, Galang. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK dan Leverage terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)*. JOM Fekon Vol. 3 No. 1
- Juliawati, Ebit, Darwanis, & Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. 1 No. 1. Hal. 15-29.
- Kusumawardani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Accounting Analysis Journal, Vol. 1. ISSN: 2252-6765.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15, <http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>

Nugroho, R.A. 2014. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011)*. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 3 No. 4

Sudarsana, H.S. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2 No. 4

Sudarmadji, M dan Sularto, Lana. 2007. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan*. Seminar Ilmiah Nasional PESAT 2007. ISSN 1858-2559

Veriza Nanda F. 2017. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Tahun Anggaran 2013-2014)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Lampung

Sumber Lainnya:

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Kepada Masyarakat.

Pasal 5 Permendagri No.73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.